



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

Padang Sidempuan, 3 Mei 2023

Nomor : 503/1335/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Kota Padang Sidempuan TW I 2023

Kepada :
Yth. Bapak Gubernur Sumatera Utara
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Utara
di -

Tempat

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada Pasal 33 Ayat 1 dan 4 dinyatakan bahwa Bupati/Wali Kota Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan laporan tersebut dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kota Padang Sidempuan untuk Triwulan IV Tahun 2022 dengan format terlampir.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



LAPORAN PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG SIDEMPUAN TRIWULAN I TAHUN 2023

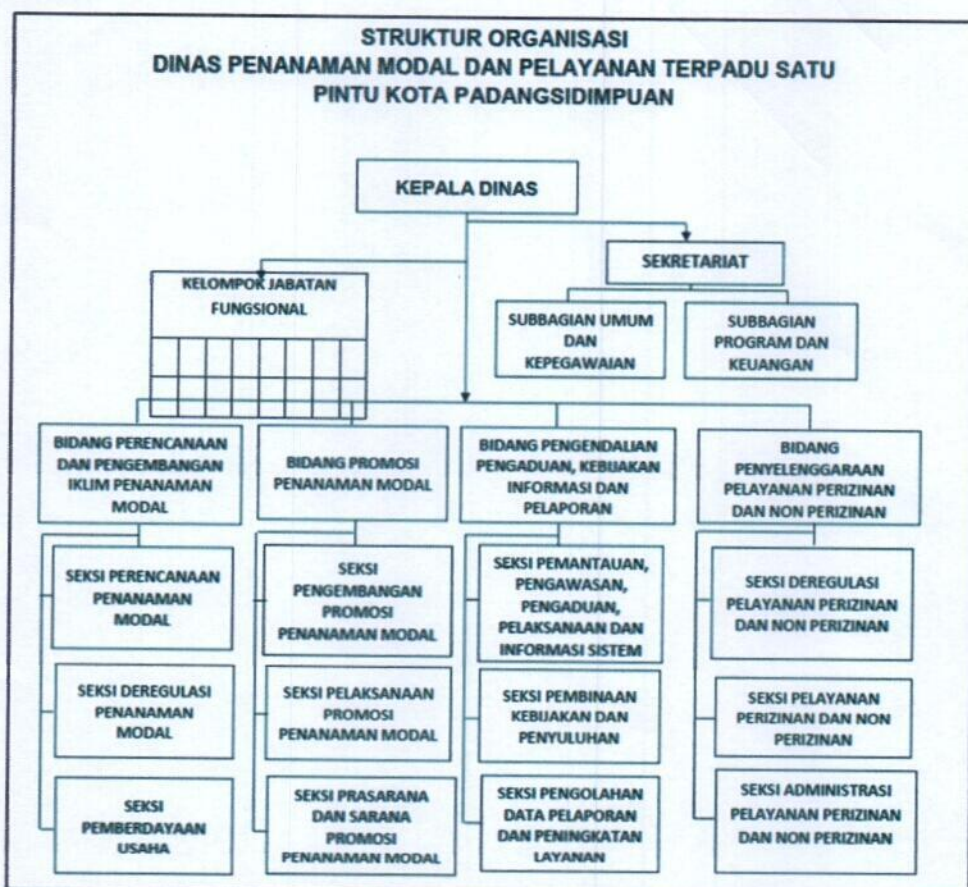
1. KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

a. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

- Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan.
- Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan.

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan.



Sumber: Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Padang Sidempuan

2. PENDELEGASIAN KEWENANGAN MELALUI

- Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Sidempuan.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Fungsional
1	Berdasarkan Kebutuhan					
	• Terisi	1	5	1	12	10
	• Belum Terisi	-	-	-	-	2
2	Berdasarkan Pangkat					
	• Golongan IV/c	-	-	-	-	-
	• Golongan IV/b	1	1	-	-	-
	• Golongan IV/a	-	1	-	-	-
	• Golongan III/d	-	2	1	2	11
	• Golongan III/c	-	1	1	-	1
	• Golongan III/b	-	-	-	-	-
	• Golongan III/a	-	-	-	2	-
	• Golongan II/d	-	-	-	5	-
	• Golongan II/c	-	-	-	1	-
	• Golongan II/b	-	-	-	-	-
	• Golongan II/a	-	-	-	-	-
3	Berdasarkan Jenis Kelamin					
	• Laki - laki	1	2	1	9	6
	• Perempuan	-	3	5	2	5

4. SARANA DAN PRASARANA

a. Kantor Depan (Front Office)

- Locket Penerimaan : Ada
- Locket Penyerahan : Ada
- Locket Pembayaran : Tidak Ada
- Ruang/Tempat Layanan Informasi : Ada
- Ruang/Tempat Layanan Pengaduan : Ada
- Ruang/Tempat Layanan Konsultasi : Ada

b. Kantor Belakang (Back Office)

- Ruang Rapat : Ada
- Ruang Pemrosesan : Ada

c. Ruang Pendukung

- Ruang Tunggu : Ada
- Ruang Laktasi : Ada
- Ruang Diafabel dan Manula : Ada
- Ruang Bermain Anak : Ada
- Ruang Arsip dan Perpustakaan : Ada
- Toilet/Kamar Mandi : Ada
- Tempat Ibadah : Ada
- Tempat Parkir : Ada
- Ruang Tempat Jualan Makanan dan Minuman : Tidak Ada

d. Alat/Fasilitas Pendukung

- Seragam Pelayanan : Ada
- Formulir : Ada
- Telepon dan Mesin Faksimile : Ada
- Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner : Ada
- Mesin Antrian : Tidak Ada
- Kotak Pengaduan : Ada
- Mesin Fotokopi : Ada
- Kamera Pengawas (CCTV) : Ada
- Koneksi Internet : Ada
- Laman/Website dan Email : Ada
- Alat Penyedia Daya Listrik/Uninterruptible Power Supply (UPS) : Ada
- Alat Pemadam Kebakaran : Ada
- Pendingin Ruangan : Ada

- Televisi : Ada
- Brosur : Ada
- Banner : Ada

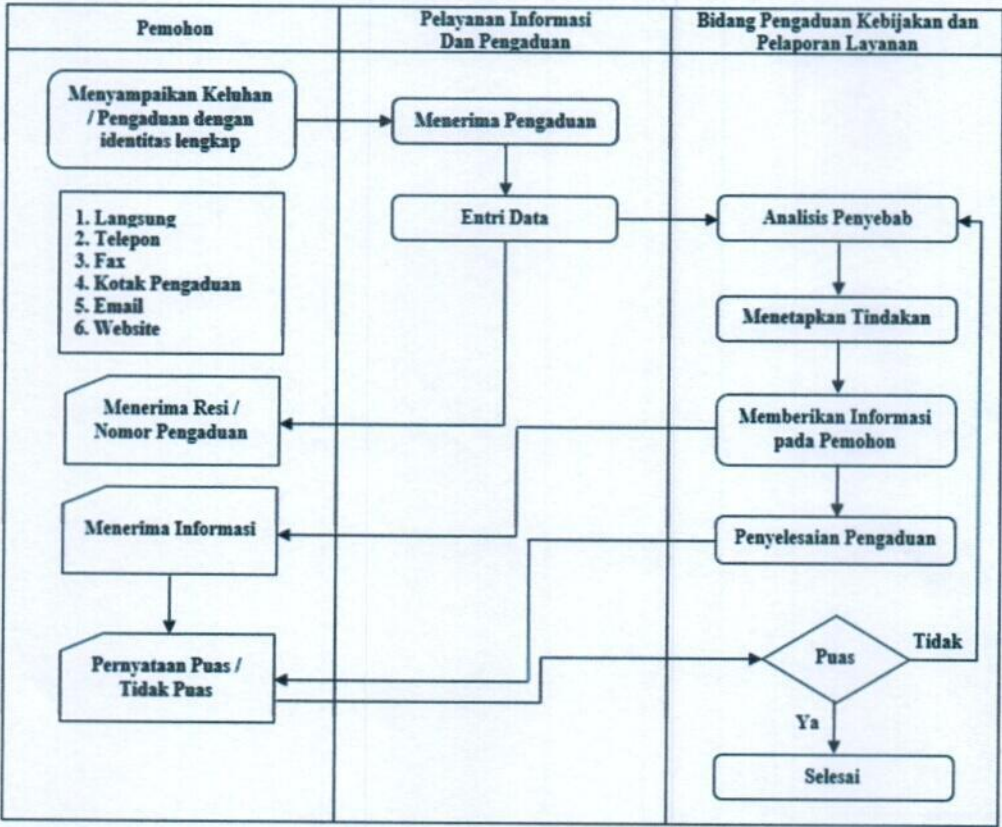
5. MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN, DAN STANDAR OPERASIONAL PUBLIK

- a. Maklumat Pelayanan Publik (MPP) : Ada
- b. Standar Pelayanan (SP) : Ada
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Ada

6. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I Tahun 2023 dengan nilai interval konversi sebesar 89, 465 (Delapan Puluh Sembilan koma empat ratus enam puluh lima) dengan kategori mutu pelayanan SANGAT BAIK (A).

7. PENGELOLAAN PENGADUAN



8. INOVASI LAYANAN

- a. Website :
 - dinasperizinan.padangsidempuankota.go.id
- b. Proses Perizinan melalui Aplikasi :
 - Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)
- c. Email Kantor :
 - perizinan@padangsidempuankota.go.id
- d. Kamis Ceria

Kamis Ceria adalah inovasi layanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Sidempuan yang dikhususkan untuk UMKM dan Koperasi dalam pengurusan perizinan dengan menyederhanakan birokrasi perizinan pada hari Kamis dengan waktu selesai 3 jam apabila persyaratan lengkap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PERIZINAN BEUSAHA BERBASIS RISIKO

Untuk Triwulan I Tahun 2023 Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan melalui pengawasan rutin dan insidental dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Pengawasan Rutin

Pengawasan Rutin dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2023 untuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada sektor perdagangan dan sektor kesehatan.
- 2. Pengawasan Insidental

Pengawasan Insidental dilaksanakan pada bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2023 untuk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada sektor perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor perindustrian.

10. PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Sektor / Bidang / Nama Izin			Jenis Izin	Keterangan
A.	Perizinan Berusaha Sektor Ketenagalistrikan			
	1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Izin Usaha	

	2.	Izin Operasional	Izin Usaha	
	3.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Izin Usaha	
	4.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Izin Usaha	

B.	Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan			
	1.	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	
	2.	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	
	3.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	
	4.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	
	5.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	
	6.	Pendaftaran Usaha Budi daya Hortikultura	Izin Usaha	
	7.	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	
	8.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	Izin Komersial/Operasional	
	9.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	
	10.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	
	11.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Usaha	
C.	Perizinan Berusaha Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
	Bidang Pemanfaatan Hutan			
	1.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)	Izin Usaha	
	2.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK	Izin Usaha	

		Silvo Fishery)		
	3.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu (IUPHHBK) pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
	4.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	Izin Usaha	
	5.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Izin Usaha	
	Bidang Pembenihan			
	1.	Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Izin Usaha	
	Bidang Lingkungan Hidup			
	1.	Izin Lingkungan	Izin Usaha	
	Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa dan Penghasil dan Limbah Non B3			
	1.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	
	2.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial/ Operasional	
	3.	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Izin Komersial/ Operasional	
D.	Perizinan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan			
	1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	
	2.	Izin Mendirikan Bangunan	Non-OSS	
	3.	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha	
	4.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional	
	5.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional	

	6.	Pengesahaan Pertelaan	Izin Komersial/ Operasional	
	7.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS)	Izin Komersial/ Operasional	
	8.	Pengesahan Site Plan Perumahan	Izin Komersial/ Operasional	
	9.	Izin Alih Fungsi Lahan Sektor Perumahan dan Permukiman	Izin Komersial/ Operasional	

E.	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan			
	1.	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha	
	2.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial/ Operasional	
	3.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Usaha	
	4.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha	
	5.	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/ Operasional	
	6.	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/ Operasional	
	7.	Izin Operasional Laborato- rium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/ Operasional	
	8.	Izin Apotek	Izin Usaha	
	9.	Izin Toko Obat	Izin Usaha	
	10.	Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/ Operasional	
	11.	Izin Praktik Dokter	Non-OSS	
	12.	Izin Praktik Bidan	Non-OSS	
	13.	Izin Praktik Perawat	Non-OSS	
	14.	Izin Praktik Apoteker	Non-OSS	
	15.	Izin Praktik Rekam Medik	Non-OSS	
	16.	Izin Praktik Radiologi	Non-OSS	
	17.	Izin Praktik SKM (Sarjana Kesehatan Masyarakat)	Non-OSS	

	18.	Izin Praktik Fisioterapi	Non-OSS	
	19.	Izin Praktik Kefarmasian	Non-OSS	
F.	Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian			
	1.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha	
	2.	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	
	3.	Izin Perluasan	Izin Usaha	

G.	Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan			
	1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	
	2.	Tanda Daftar Perusahaan	NIB/Pendaftaran	
	3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Izin Usaha	
	4.	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha	
H.	Perizinan Berusaha Sektor Perhubungan			
	1.	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkerataapian Umum	Izin Usaha	
	2.	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkerataapian Khusus	Izin Usaha	
	3.	Izin Penyelenggaraan Ang-kutan Orang	Izin Usaha	
	4.	Izin Penyelenggaraan Pela-buhan Penyeberangan	Izin Usaha	
	5.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	Izin Usaha	
	6.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial/Operasional	
	7.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	Izin Komersial/Operasional	
	8.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	Izin Komersial/Operasional	
I.	Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata			
	1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha	
J.	Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Kebudayaan			
	1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	

	2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-formal	Izin Komersial/ Operasional	
K.	Perizinan Berusaha Sektor Agama dan Keagamaan			
	1.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial/ Operasional	
L.	Perizinan Berusaha Sektor Tenaga Kerja			
	1.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	
	2.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Usaha	
M.	Perizinan Berusaha Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)			
	1.	Izin Koperasi	Izin Usaha	
	2.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi	Izin Komersial/ Operasional	
	3.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	Izin Komersial/ Operasional	
	4.	Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (IUMKM)	Izin Komersial/ Operasional	
N.	Perizinan Sektor Lainnya			
	1.	Izin Lokasi	Izin Komersial/ Operasional	
	2.	Izin Alih Fungsi lahan	Izin Komersial/ Operasional	
	3.	Izin Reklame	Izin Komersial/ Operasional	
	4.	Izin Tower	Izin Komersial/ Operasional	

11. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah ataupun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur dan menetapkan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

12. PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Jumlah izin dan nonizin yang diterbitkan pada Triwulan I (Januari s/d Maret) Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Sidempuan Nomor

25 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai berikut.

No.	Jenis Izin	Triwulan I		
		Jan	Feb	Mar
1.	Izin OSS-RBA	48	49	72
2.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	-	-	-
3.	Izin Operasional	-	-	-
4.	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	-	-	-
5.	Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	-	-	-
6.	Izin Usaha Perkebunan	-	-	-
7.	Izin Usaha Tanaman Pangan	-	-	-
8.	Izin Usaha Peternakan	-	-	-
9.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	-	-	-
10.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	-	-	-
11.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	-	-	-
12.	Pendaftaran Usaha Peternakan	-	-	-
13.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ruminansia dan Babi	-	-	-
14.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	-	-	-
15.	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-
16.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	-	-	-
17.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-
18.	Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-
19.	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu pada Hutan Produksi	-	-	-
20.	Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi	-	-	-
21.	Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	-
22.	Penetapan Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	-	-	-
23.	Izin Lingkungan	-	-	-

24.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	-	-	-
25.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	-	-	-
26.	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	-	-	-
27.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	-	-
28.	Izin Mendirikan Bangunan	-	-	6
29.	Surat Izin Peil Banjir	-	-	-
30.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	-	-	-
31.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	-	-	-
32.	Pengesahan Pertelaan	-	-	-
33.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun	-	-	-
34.	Pengesahan Site Plan Perumahan	-	-	-
35.	Izin Alih Fungsi Lahan Sektor Perumahan dan Permukiman	-	-	-
36.	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	-	-	-
37.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	-	-	-
38.	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-
39.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	-	-	-
40.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	-	-
41.	Izin Operasional Klinik	-	-	-
42.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	-	-	-
43.	Izin Apotek	-	-	-
44.	Izin Toko Obat	-	-	-
45.	Izin Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	-	-	-
46.	Izin Praktek Dokter	11	7	10
47.	Izin Praktek Bidan	48	23	31
48.	Izin Praktek Perawat	17	10	13

49.	Izin Praktek Apoteker	1	-	4
50.	Izin Praktek Rekam Medik	-	1	1
51.	Izin Praktek Radiologi	-	1	-
52.	Izin Praktek Sarjana Kesehatan Masyarakat	5	6	-
53.	Izin Praktek Fisioterapi	1	-	-
54.	Izin Praktek Kefarmasian	2	-	5
55.	Izin Usaha Industri	-	-	-
56.	Izin Usaha Kawasan Industri	-	-	-
57.	Izin Perluasan Industri	-	-	-
58.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	-	-	-
59.	Tanda Daftar Perusahaan	-	-	-
60.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-	-	-
61.	Tanda Daftar Gudang	-	-	-
62.	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum	-	-	-
63.	Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Khusus	-	-	-
64.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	-	-	-
65.	Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	-	-	-
66.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau	-	-	-
67.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	-	-	-
68.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum	-	-	-
69.	Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus	-	-	-
70.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-	-	-
71.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	-	-	-
72.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	-
73.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat	-	-	-
74.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	-	-	-

75.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-
76.	Izin Koperasi	-	-	-
77.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi	-	-	-
78.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	-	-	-
79.	Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	-	-
80.	Izin Lokasi	-	-	-
81.	Izin Alih Fungsi Lahan	-	-	-
82.	Izin Reklame	13	8	2
83.	Izin Tower	-	-	-
Jumlah		98	56	144

13. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI

a. Rencana Investasi

Data rencana investasi untuk di Triwulan I Tahun 2023 dengan investasi sebesar Rp.25.000.000.000, - (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)

b. Realisasi Investasi

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah proyek berdasarkan sektor per Triwulan I Tahun 2023 dengan nilai realisasi invesatari sebesar Rp. 7.449.551.308,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing berdasarkan adalah proyek berdasarkan sektor per Triwulan I Tahun 2023 dengan realisasi investasi sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

14. KENDALA DAN SOLUSI

a. Bidang Pelayanan Perizinan

No.	Kendala	Solusi
1	Jumlah SDM masih belum cukup sehingga dirasa perlu	Agar SDM dapat ditambah

	penambahan staf maupun sosialisasi / pelatihan untuk meningkatkan kualitas staf	
2	Adanya urusan perizinan yang belum memiliki tenaga ahli	Koordinasi dengan OPD terkait tentang tenaga ahli tertentu
3	Tim Teknis belum berkantor di DPMPTSP Kota Padang Sidempuan	Perlu adanya anggaran untuk Fasilitas Tim Teknis
4	Rekomendasi perizinan masih menjadi kewenangan kepala OPD yang seharusnya diberikan kepada Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh OPD tersebut (sesuai dengan Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP)	Diperlukan sosialisasi Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP

b. Bidang Penanaman Modal

No.	Kendala	Solusi
1	Kerjasama Penanaman Modal pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas	Mengupayakan terlaksananya kerjasama dengan dunia usaha secara berkesinambungan
2	Masih kurangnya Sarana dan Prasarana dalam fasilitas kerja sehingga pemberian layanan masih belum maksimal	Melengkapi Sarana dan Prasarana
3	Promosi Penanaman Modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Padang Sidempuan	Meningkatkan promosi melalui event-event dan ekspo-ekspo yang dilaksanakan baik tingkat daerah maupun nasional
4	Keterbatasan Anggaran	Penambahan anggaran
5	Kurangnya Koordinasi dengan Perusahaan dan Lembaga terkait	Meningkatkan koordinasi

c. Bidang Pengaduan

No.	Kendala	Solusi
1	Kurangnya SDM dalam penanganan pengaduan masyarakat	Menambah jumlah ASN untuk menangani pengaduan masyarakat
2	Jaringan sistem terkadang error sehingga mengganggu penanganan pengaduan	Penempatan petugas IT untuk menerima pengaduan
3	Surat pengaduan yang masuk tidak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat	Harus turun ke lapangan untuk mengetahui kebenaran isi surat pengaduan

WALIKOTA PADANG SIDEMPUAN



IRSAN EFFENDI NASUTION, SH, MM